

Evaluasi dampak dana desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia

Kurniawan

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bulungan, Tarakan.
Email: Mahakaryakurniawanamir@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. Menggunakan alat analisis perbandingan sebelum dan sesudah (*before and after comparinsons*) berhasil mengevaluasi dampak Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia tahun 2015-2018. Hasil penelitian menjelaskan output pembangunan infrastruktur desa di seluruh Indonesia adalah jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDesa, tambatan perahu, embung, irigasi, sarana olah raga, penahan tanah, air bersih, MCK, polides, drainase, PAUD, posyandu, dan sumur. Selanjutnya, Dana Desa berdampak pada berkurangnya kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan desa di Indonesia. Temuan menarik lainnya adalah realisasi Dana Desa berdampak pada pembangunan infrastruktur desa di Indonesia.

Kata Kunci: Dana desa; infrastruktur desa

Impact of the village fund on village infrastructure development in Indonesia

Abstract

This study aims to evaluate the impact of the Village Fund on village infrastructure development in Indonesia. Using a before and after comparison analysis tool (before and after comparison) succeeded in evaluating the impact of the Village Fund on village infrastructure development in Indonesia in 2015-2018. The results of the study explained that the output of village infrastructure development throughout Indonesia is village roads, bridges, village markets, BUMDesa, boat moorings, reservoirs, irrigation, sports facilities, land retaining, clean water, toilets, polides, drainage, PAUD, posyandu, and wells. . Furthermore, the Village Fund has an impact on reducing the need for basic economic, health, education and village security infrastructure in Indonesia. Another interesting finding is that the realization of the Village Fund has an impact on village infrastructure development in Indonesia.

Keywords: Village fund; village infrastructure

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian strategis untuk mencapai tujuan yang hakiki bangsa Indonesia sebagaimana terikrar dengan tegas dalam pembukaan UUD Tahun 1945 yaitu, “perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Rakyat Indonesia tidak hanya cukup sampai kedepan pintu kemerdekaan, akan tetapi segenap warga negara Indonesia harus merasakan kemerdekaan yang nyata terutama terlepas dari jeratan kemiskinan sehingga memiliki kehidupan yang layak.

Berdasarkan data BPS (2019) persentase penduduk miskin di daerah pedesaan pada Maret 2018 sebesar 13,20 persen dan turun menjadi 13,10 persen pada September 2018. Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2018 sebesar 7,02 persen, turun menjadi 6,89 persen pada September 2018. Berdasarkan data tersebut menjelaskan sebagian besar penduduk miskin di Indonesia ada di daerah pedesaan. Dinamika pembangunan desa menjadi sangat kompleks ketika wilayah suatu desa terdiri atas beragam potensi sumber daya alam, letak geografis, dan kualitas sumber daya manusia. Penduduk di daerah pedesaan aktivitas utamanya berada di sektor pertanian, perkebunan, dan aktifitas lainnya terutama sektor informal. Karakteristik desa menjadi bagian dari keberagaman yang dapat menjadi sebuah keunggulan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat pedesaan.

Terbitkannya UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) sebagai puncak dari dinamika pembangunan desa di Indonesia. Desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Langkah strategis selanjutnya pemerintah menerbitkan PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana desa (DD) diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Nawa cita ke 3 presiden Joko Widodo tahun 2015-2019 adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia. Nawacita yang ke 3 ini langkah strategis selanjutnya yang dilakukan pemerintah menjadikan desa mandiri dan dalam rangka melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote. Tujuannya utamanya adalah masyarakat di perbatasan, di pulau-pulau terluar, di kawasan tertinggal merasakan kehadiran negara. Pemerintah Indonesia sukses mendistribusikan total Dana Desa tahun 2015-2018 sebesar Rp 185,65 triliun untuk 74,954 desa yang ada di Indonesia.

Tabel 1. Dana desa tahun 2015-2018

| Tahun | Dana Desa (Triliun) | Rata-rata/desa (Juta) |
|-------|---------------------|-----------------------|
| 2015 | 20,67 | 280,3 |
| 2016 | 46,98 | 643,6 |
| 2017 | 60 | 800,4 |
| 2018 | 60 | 800,4 |

Capaian pembangunan desa menggunakan Dana Desa dapat dijelaskan oleh data indeks pembangunan desa (IPD). IPD menjelaskan aspek pelayanan dasar kondisi, kondisi, infrastruktur, aksesibilitas atau transportasi, pelayanan umum, dan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Tabel 2. Indeks pembangunan desa (IPD) di Indonesia

| Tahun | Desa mandiri | Desa berkembang | Desa tertinggal |
|-------|--------------|-----------------|-----------------|
| 2015 | 2.894 | 51.026 | 19.750 |
| 2018 | 5.559 | 54.879 | 13.232 |

Data IPD menjelaskan keberhasilan pembangunan desa di Indonesia dengan berkurangnya desa tertinggal, meningkatnya desa berkembang, dan mandiri. Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi (KDPDPTT) melakukan pengukuran capaian pembangunan desa yaitu indeks

desa membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit yang dibangun berdasarkan tiga dimensi yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi.

Tabel 3. Indeks desa membangun (IDM) di Indonesia

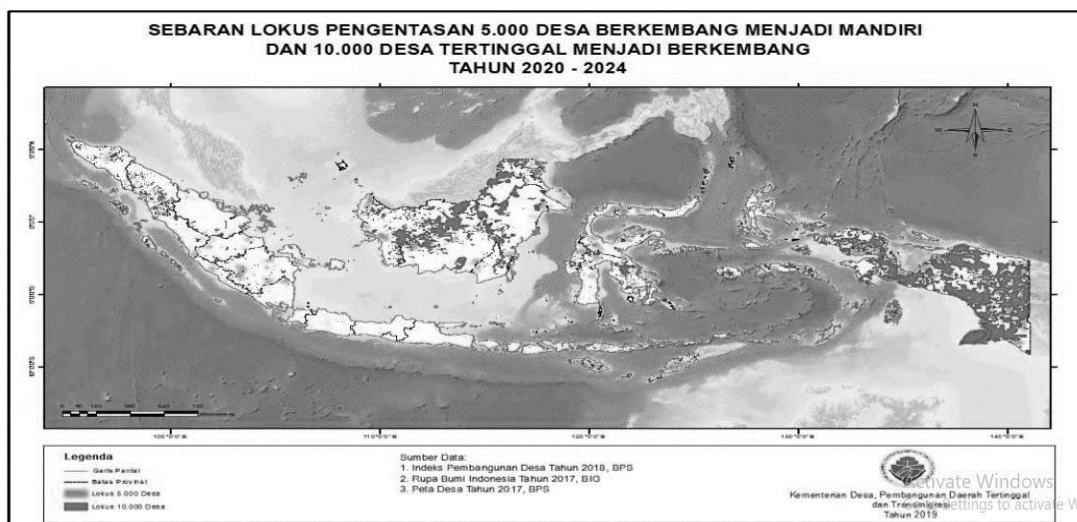
| Status Desa | 2014 | 2018 | Pencapaian |
|-------------------|--------|--------|------------|
| Mandiri | 174 | 308 | 134 |
| Maju | 3.608 | 4.805 | 1.197 |
| Berkembang | 22.882 | 30.561 | 7.679 |
| Tertinggal | 33.592 | 27.962 | -5.630 |
| Sangat Tertinggal | 13.453 | 9.131 | -4.332 |

Data IDM menjelaskan capaian pembangunan desa di Indonesia dengan berkurangnya desa tertinggal dan sangat tertinggal serta bertambahnya desa mandiri, maju, dan berkembang. Berdasarkan data IPD dan IDM tahun 2015-2018 dampak Dana Desa untuk menggerakkan pembangunan desa mampu meningkatkan status kemandirian desa. Kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi (KDPDTT) dalam rangka untuk melaksanakan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam pembangunan desa diantaranya: mengurangi 5000 desa tertinggal menjadi desa berkembang, meningkatkan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri, meningkatkan keterkaitan desa-kota dan ekonomi kawasan perdesaan untuk percepatan desa mandiri, mengentaskan 80 daerah tertinggal, membangun dan mengembangkan kawasan yang berfokus pada satuan permukiman (SP) menjadi pusat satuan di 144 Kawasan pengembangan (SKP) yang merupakan pusat pengolahan hasil pertanian/perikanan dan mendukung sasaran kemandirian pangan nasional, dan mengembangkan 20 kawasan perkotaan baru (KPB) menjadi embrio pusat pertumbuhan.

Tabel 4. Anggaran KDPDTT tahun 2015-2018

| Tahun | Anggaran |
|-------|--------------------|
| 2015 | 8.942.768.855.000 |
| 2016 | 8.283.618.933.000 |
| 2017 | 4.751.565.972.000 |
| 2018 | 5.888.602.212.000 |
| Total | 27.866.555.972.000 |
| | 0 |

Berdasarkan tabel 4 menjelaskan besarnya anggaran KDPDTT tahun 2015-2018. Anggaran KDPDTT sebesar Rp 8.942.768.855.000 pada tahun 2015 dan berkurang menjadi Rp 5.888.602.212.000 pada tahun 2018. Baffoe (2019) mengeksplorasi kegunaan *Analytic Hierarchy Process* (AHP) dalam menentukan intervensi paling dibutuhkan desa. Penerapan AHP dalam pembangunan desa berpotensi untuk mengatasi masalah salah sasaran pembangunan di daerah pedesaan.



Gambar 1. Lokus pembangunan desa di Indonesia (kdpdtt, 2019)

Berdasarkan KDPDTT (2019) lokus pembangunan desa di Indonesia menggambarkan sebaran desa tertinggal terbanyak di pulau Papua (6.305 desa), desa berkembang dan mandiri terbanyak di pulau Jawa-Bali dengan 19.072 desa berkembang, dan 3.839 desa mandiri. Asher & Novosad (2018) sebagian besar penduduk miskin dunia berada di daerah pedesaan tanpa akses ke jaringan infrastruktur yang baik. Sulitnya mendistribusikan hasil produksi dari pedesaan berdampak pada biaya transportasi yang tinggi menghambat peningkatan skala ekonomi dan spesialisasi. Pembangunan jalan di pedesaan menumbuhkan sektor produksi melalui perdagangan dengan pasar luar, meningkatkan, upah dan menyediakan lapangan kerja. Warda (2019) pertumbuhan ekonomi desa, beragamnya sektor pekerjaan, keberadaan kompleks pertokoan, perbaikan akses masyarakat terhadap air minum layak, dan pembangunan saluran irigasi di desa, serta aksi kolektif masyarakat merupakan indikator-indikator yang secara signifikan berkorelasi dengan ketimpangan yang lebih tinggi.

Thacker *et al.*, (2019) investasi infrastruktur dimotivasi oleh keinginan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan lapangan kerja. Infrastruktur baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi 72% pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). Khandker *et al.*, (2009) investasi jalan di pedesaan terbukti dapat mengurangi kemiskinan secara signifikan melalui produksi pertanian yang lebih tinggi, upah yang lebih tinggi, biaya input, biaya transportasi yang lebih rendah, dan harga output yang lebih tinggi. Sumodiningrat & Wulandari (2016) membangun desa karena mayoritas masyarakat tinggal di wilayah pedesaan dengan potensi ekonomi, keuangan, dan modal sosial yang sebagian besar ada di pedesaan. Pembangunan manusia sebagai subjek untuk membangun dan memperdayakan desanya masing-masing. Program memperdayakan masyarakat desa OPOP (*One Person One Product*), OVOP (*One Village One Product*), dan OVOC (*One Village One Corporation*).

Theory of Change (teori perubahan) adalah deskripsi tentang bagaimana intervensi memberikan hasil yang tidak diinginkan. Teori skenario peristiwa yang mengarah ke hasil untuk dieksplorasi kondisi dan asumsi yang diperlukan agar perubahan terjadi, menjelaskan alasan di balik program, dan memetakan intervensi program sepanjang jalur sebab yang logis. Bekerja dengan pemangku kepentingan program untuk menyusun teori perubahan dapat memperjelas dan meningkatkan desain program (Gertler *et al.*, 2016). Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia.

Khandker *et al.*, (2010) evaluasi dampak merupakan upaya untuk memahami apakah perubahan kesejahteraan memang disebabkan oleh intervensi proyek atau program. Secara khusus, evaluasi dampak mencoba untuk menentukan apakah mungkin untuk mengidentifikasi efek program dan sejauh mana efek yang diukur dapat dikaitkan dengan program dan bukan ke beberapa penyebab lainnya. Josselin (2017) evaluasi program adalah proses yang terdiri dari pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi. Gertler *et al.*, (2016) evaluasi dampak adalah pendekatan yang mendukung kebijakan berbasis bukti. Evaluasi adalah penilaian berkala, obyektif dari proyek, program, atau kebijakan yang direncanakan, sedang berlangsung, atau diselesaikan. Evaluasi digunakan untuk menjawab pertanyaan spesifik, terkait dengan desain, implementasi, atau hasil. Drummond *et al.*, (2015) evaluasi dampak dalam praktek memahami pilihan rancangan program mana yang paling hemat biaya, atau tunjukkan kepada para pengambil keputusan bahwa program mencapai hasil yang diinginkan untuk mendapatkan alokasi anggaran untuk melanjutkan atau mengembangkannya. Bukti kuat yang dihasilkan oleh evaluasi dampak semakin berfungsi sebagai dasar untuk akuntabilitas, inovasi, dan pembelajaran yang lebih baik.

Penelitian sebelumnya yang mencoba mengevaluasi dampak Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia telah beberapa kali dilakukan. Wibowo *et al.*, (2019) mengevaluasi dampak alokasi dana desa terhadap peningkatan pembangunan daerah yang dilihat dari perbaikan modal fisik, modal sumber daya manusia, serta peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat (pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran). Hasil penelitian menjelaskan pengalokasian Dana Desa memberikan dampak perbaikan capaian pembangunan infrastruktur output pelayanan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, serta memperbaiki capaian perekonomian, namun belum dapat memperbaiki indikator kesejahteraan. Muslihah *et al.*, (2019) mengevaluasi dampak Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan di wilayah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian menjelaskan terdapat perbedaan yang signifikan pada pembangunan fisik dan kesejahteraan masyarakat antara sebelum dan setelah Dana Desa.

Akbar *et al.*, (2019) mengevaluasi dampak program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur fisik lintas provinsi di Indonesia. Hasil analisis menjelaskan Dana Desa berpengaruh positif terhadap nilai konstruksi akhir sebesar 0,033%. Indraningsih *et al.*, (2021) mengevaluasi dampak Dana Desa khususnya bagi pembangunan pertanian di tiga tipologi desa di Provinsi Jawa Barat, DI Yogyakarta, Riau, Kalimantan Timur, dan Gorontalo. Hasil penelitian menjelaskan Dana Desa berpengaruh terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani karena proses pengangkutan menjadi lebih mudah melalui perbaikan infrastruktur pertanian.

Selanjutnya penelitian yang menemukan pemanfaatan Dana Desa pada pembangunan infrastruktur. Bachtiar *et al.*, (2019) meneliti proses perencanaan pembangunan desa pada tahun anggaran 2015 dan 2016, serta menelusuri penggunaan Dana Desa dan manfaatnya bagi warga desa secara umum dan kelompok marginal secara khusus. Hasil penelitian menjelaskan pembangunan infrastruktur mendominasi belanja desa. Batubara *et al.*, (2020) meneliti efektifitas Dana Desa dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menjelaskan fokus pemanfaatan pada pembangunan infrastruktur. Iskandar & Aritenang, (2017) meneliti kondisi desa Cihideung yang diklasifikasikan dalam 'Desa Maju' berdasarkan tipologi desa Indonesia. Hasil penelitian menjelaskan Dana Desa dikerahkan untuk pembangunan jalan.

Marhaeni & Sudibia, (2020) menganalisis pengaruh Dana Desa terhadap kondisi infrastruktur desa di Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian menjelaskan Dana Desa berpengaruh positif terhadap infrastruktur desa. Nasution *et al.*, (2017) menganalisis peran Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah di Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhanbatu. Hasil penelitian menunjukkan Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, parit dan jembatan gantung.

Penelitian di negara lain dalam program pembangunan infrastruktur desa. Pavel *et al.*, (2018) menyelidiki apakah investasi publik dalam infrastruktur dasar pedesaan merupakan strategi terbaik untuk meningkatkan ekonomi lokal komunitas pedesaan di Rumania. Temuan utama menjelaskan investasi dalam infrastruktur benar-benar membantu pembangunan desa. Dinu *et al.*, (2020) mengidentifikasi sejauh mana Rumania telah mengakses dana Eropa untuk pertanian dan pembangunan pedesaan pada periode 2014-2020 melalui Program Pembangunan Pedesaan Nasional (NRDP). Hasil penelitian menjelaskan implementasi dana Eropa terutama di bidang pertanian dan pembangunan pedesaan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi, periode waktu, data, dan metode. Penelitian ini bermanfaat menjelaskan dampak Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. Selanjutnya sebagai evaluasi dalam mendistribusikan dan menentukan prioritas pemanfaatan Dana Desa.

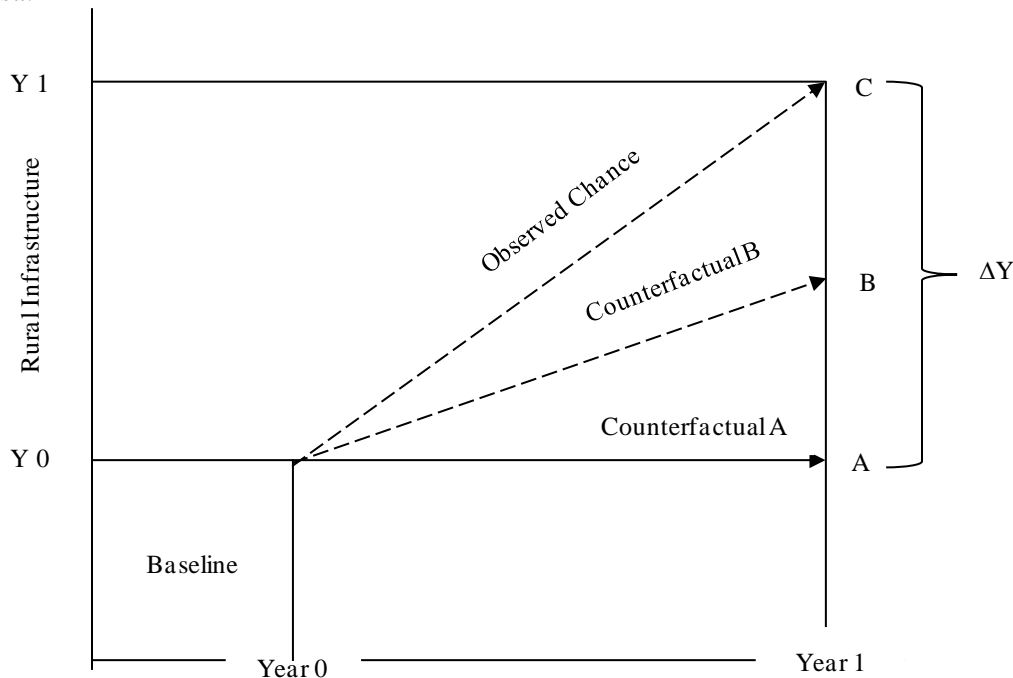
METODE

Penelitian ini mengevaluasi dampak Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. Data yang digunakan adalah output infrastruktur dan kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, Pendidikan, dan keamanan dari Dana Desa seluruh desa di Indonesia tahun 2015-2018. Data yang digunakan bersumber dari kementerian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi (KDPDTT) dalam laporan kinerja Kinerja Utama Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD tahun 2018). Data kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, dan pendidikan tidak tersedia pada laporan kinerja Ditjen PPMD tahun 2019.

Alat analisis yang digunakan pada penelitian adalah perbandingan sebelum dan sesudah (*before-after comparisons*). Menurut Gertler *et al.*, (2016) perbandingan sebelum dan sesudah mencoba menetapkan dampak program dengan melacak perubahan hasil bagi peserta program dari waktu ke waktu. Intinya, perbandingan ini mengasumsikan bahwa jika program tidak pernah ada, maka *outcome* bagi peserta program akan sama persis dengan keadaan sebelum program. Menurut Khandker *et al.*, (2010); Josselin (2017); Gertler *et al.*, (2016); Drummond *et al.*, (2015), & Bamberger & Fujita (2008) perbandingan sebelum dan sesudah (*before-after comparisons*) atau metode perbedaan sederhana tidak akan menjadi penilaian yang akurat bila tidak mengontrol faktor-faktor yang berdampak pada program.

Penelitian ini di desain menggunakan perbandingan sebelum dan sesudah dengan cara mengontrol hasil pembangunan infrastruktur desa di Indonesia menggunakan data output dan kebutuhan

infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, Pendidikan, dan keamanan. Data tersebut dapat diandalkan (*reliable*) untuk menjelaskan output Dana Desa. Model evaluasi dampak penelitian ini adalah $Y_i = \alpha X_i + \beta T_i + \varepsilon_i$. Variabel Y_i adalah infrastruktur desa atau output dari Dana Desa dan variabel X_i adalah Dana Desa.



Gambar 2. Evaluasi dampak perbandingan *before* dan *after*

Pada gambar 2 menjelaskan dua poin pengamatan, infrastruktur desa sebelum Dana Desa (Y_0) dan Infrastruktur desa setelah Dana Desa (Y_2). Dampak program dapat diperkirakan sebagai $(Y_2 - Y_0)$. *Baseline* sebagai perkiraan kontrafaktual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menemukan output dan kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, dan keamanan pendidikan desa di Indonesia. Berikut output Dana Desa desa di Indonesia tahun 2015-2018.

Tabel 5. Output pembangunan infrastruktur desa di Indonesia tahun 2015-2018

| No | Output | Jumlah |
|----|------------------|--------------|
| 1 | Jalan desa | 123.145 KM |
| 2 | Jembatan | 791.258 M |
| 3 | Pasar desa | 5.220 Unit |
| 4 | Tambatan perahu | 2.882 Unit |
| 5 | Embung | 1.927 Unit |
| 6 | Irigasi | 28.091 Unit |
| 7 | Sarana olah raga | 3.004 Unit |
| 8 | Penahan tanah | 65.918 Unit |
| 9 | Air bersih | 37.496 Unit |
| 10 | MCK | 108.486 Unit |
| 11 | Polindes | 5.314 Unit |
| 12 | Drainase | 38.217 KM |
| 13 | PAUD | 18.072 Unit |
| 14 | Posyandu | 11.424 Unit |
| 15 | Sumur | 30.212 Unit |

Berdasarkan tabel 4 menjelaskan output pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. Jalan desa adalah prioritas pembangunan desa di Indonesia. Berikut adalah kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan desa di Indonesia tahun 2015-2018.

Tabel 5. Kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan desa di Indonesia tahun 2015-2018

| Jenis Kebutuhan | 2014 | 2018 | Berhasil |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| Fasilitas ekonomi | | | |
| Berkembang lebih dari satu jenis kegiatan ekonomi produk | 67.759 | 8.471 | 59.288 |
| Akses penduduk ke pusat perdagangan (pertokoan dan pasar) | 51.869 | 10.350 | 41.519 |
| Terdapat pasar desa | 39.341 | 12.748 | 26.593 |
| Terdapat sektor perdagangan (warung) | 73.078 | 3.373 | 69.705 |
| Terdapat kantor pos dan jasa logistik | 73.112 | 14.317 | 58.795 |
| Tersedianya lembaga perbankan umum dan BPR | 73.239 | 14.108 | 59.131 |
| Akses penduduk ke kredit | 67.681 | 14.810 | 52.871 |
| Tersedianya lembaga ekonomi rakyat (koperasi)/BUM Desa | 67.759 | 11.272 | 56.487 |
| Terdapat usaha kedai makanan, restoran, hotel dan penginapan | 73.547 | 14.018 | 59.529 |
| Terdapat moda (angkutan umum, trayek reguler dan jam operasi) | 44.321 | 13.176 | 31.145 |
| Jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda empat atau Lebih | 14.237 | 3.139 | 11.098 |
| Kualitas jalan desa aspal | 33.194 | 6.379 | 26.815 |
| Fasilitas kesehatan dan pendidikan | | | |
| Mudah akses ke poskesdes, polindes atau posyandu | 58.100 | 6.775 | 51.325 |
| Tersedianya kesehatan (bidan, dokter dan nakes lainnya) | 69.537 | 14.616 | 54.921 |
| Mayoritas warga memiliki sumber air layak minum | 66.883 | 8.399 | 58.484 |
| Mayoritas warga memiliki jamban | 24.308 | 2.905 | 21.403 |
| Terdapat tempat pembuangan sampah | 69.984 | 13.212 | 56.772 |
| Kegiatan PAUD | 33.357 | 8.896 | 24.461 |
| Kegiatan PKBM/Paket A-B-C | 58.339 | 14.044 | 44.295 |
| Kegiatan kursus | 73.619 | 14.137 | 59.482 |
| Taman bacaan masyarakat atau perpustakaan desa | 65.671 | 12.366 | 53.305 |
| Fasilitas keamanan | | | |
| Tersedianya ruang publik | 58.272 | 8.158 | 50.114 |
| Suku/etnis beragam di desa | 22.906 | 14.227 | 8.679 |
| Agama mayoritas warga desa beragam | 37.246 | 3.809 | 33.437 |
| Tersedianya sarana poskamling di desa | 37.829 | 2.621 | 35.208 |
| Partisipasi warga dalam siskamling | 37.829 | 2.347 | 35.482 |

Berdasarkan tabel 5 menjelaskan kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan desa di Indonesia tahun 2015-2018. Keberhasilan pembangunan infrastruktur desa di Indonesia di jelaskan dengan berkurangnya kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan pada tahun 2018. Berikut adalah porsi belanja Dana Desa tahun 2015-2018.

Tabel 6. Porsi belanja dana desa

| Bidang | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|
| Sarpras pelayanan sosial dasar | 13 | 14 | 18 | 18 |
| Sarpras desa | 62 | 66 | 62 | 60 |
| Sarpras ekonomi | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Sarpras lingkungan | - | - | - | - |
| Sarpras lainnya | - | - | - | 1 |
| Pemberdayaan masyarakat | 11 | 12 | 14 | 16 |
| Penyelenggaraan pemerintahan desa | 9 | 4 | 2 | 1 |
| Pembinaan kemasyarakatan | 4 | 3 | 2 | 2 |

Berdasarkan tabel 6 menjelaskan porsi belanja Dana Desa 2015-2018. Dana Desa sebagian besar di alokasikan pada pembangunan bidang sarana prasara, pelayanan sosial dasar, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pengalokasian dana desa pada bidang sarana dan prasara dengan porsi terbesar menjelaskan pembangunan bidang infrastruktur desa. Upaya pengoptimalan penggunaan Dana Desa di

Indonesia dilakukan dengan adanya pendamping desa yang bisa membantu dalam proses pemerintahan desa. Berikut adalah jumlah pendamping desa di Indonesia tahun 2015-2018.

Tabel 7. Pendamping desa tahun 2015-2018

| Tahun | Jumlah desa | Jumlah pendamping |
|-------|-------------|-------------------|
| 2015 | 74094 | 17.744 |
| 2016 | 74754 | 27.441 |
| 2017 | 74910 | 37.838 |
| 2018 | 74957 | 37.640 |

Berdasarkan tabel 7 menjelaskan jumlah pendamping desa di Indonesia tahun 2015-2018. Pendamping desa meningkat dari tahun 2015-2017 dan berkurang pada tahun 2018. Peran pendamping desa sangat penting dalam proses pemanfaatan Dana Desa.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi dampak Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia. Menggunakan alat analisis perbandingan sebelum dan sesudah (*before and after comparinsons*) berhasil mengevaluasi dampak Dana Desa terhadap pembangunan infrastruktur desa di Indonesia tahun 2015-2018. Hasil penelitian menjelaskan output pembangunan infrastruktur desa di seluruh Indonesia adalah jalan desa, jembatan, pasar desa, BUMDesa, tambatan perahu, embung, irigasi, sarana olah raga, penahan tanah, air bersih, MCK, polides, drainase, PAUD, posyandu, dan sumur. Selanjutnya, Dana Desa berdampak pada berkurangnya kebutuhan infrastruktur dasar ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keamanan desa di Indonesia. Temuan menarik lainnya adalah realisasi Dana Desa berdampak pada pembangunan infrastruktur desa di Indonesia.

Penelitian memiliki beberapa kelemahan yaitu kondisi pembangunan desa di seluruh Indonesia berbeda-beda yang dijelaskan dengan adanya mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Perbedaan kondisi infrastruktur desa membutuhkan prioritas pembangunan yang berbeda pada setiap desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T.M., & Sihaloho, D.E. (2019). The Impact of Village Fund Program in Developing Physical Infrastructure: Case on Construction Value Across Provinces in Indonesia. *Media Trend*, Vol 14 (2), 194-200.
- Asher, S., & Novosad, P. (2018). Rural Roads and Local Economic Development. *Policy Research Working Paper 8466*. World Bank.
- Batubara, C., Harahap, I., & Marpuah, S. (2020). The Impact Of Village Funds On Enhancing Welfare Of North Maluku Communities Using Falah Approach. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol 5 (1), 205-230.
- Bachtiar, P.P., Kurniawan, A., Sedyadi, M.S.G., Dinatingrat, A.R., Ruhmaniyati, & Alifia, U. (2019). Laporan Studi Kasus Undang-Undang Desa Menelusuri Manfaat Belanja Desa. *Laporan Penelitian SMERU*. The SMERU Research Institute.
- Baffoe, G. (2019). Exploring the utility of Analytic Hierarchy Process (AHP) in ranking livelihood activities for effective and sustainable rural development interventions in developing countries. *Evaluation and Program Planning*, 72, pp. 197-204.
- Dinu, M., Pătărlăgean, R.S., Chiripuci, B., & Constantin, M. (2020). Accessing the European funds for agriculture and rural development in Romania for the 2014-2020 period. *Proceedings of the 14th International Conference on Business Excellence 2020*. Sciendo. (pp. 717-727).
- Drummond, F. M., Sculpher, J.M., Claxton, K., Stoddart, L.G., Torrance, W.G. (2015). *Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes*. Fourth Edition. Oxford University Press

-
-
- Badu, E., Owusu-Manu, D., Edwards, J.D., Adesi, M., Lichtenstein, S. (2013). Rural infrastructure development in the Volta region of Ghana: barriers and interventions. *Journal of Financial Management of Property and Construction*. Vol. 18 Issue: 2, pp.142-159,
- Gertler, J.P., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersc, C. M. J. (2016). *Impact Evaluation in Practice*. Second Edition. The World Bank. Washington DC.
- https://www.kemendesa.go.id/berita/assets/files/Laporan_Kinerja_PPMD_2018_-_final.pdf. `Diakses 12 Desember 2020
- <https://idm.kemendesa.go.id/IDM2018>. Di akses 12 Desember 2020
- <https://www.bps.go.id/IPD2018>. Di akses 12 Desember 2020
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>. Diakses 12 Desember 2020.
- Indraningsih, S.K., Nahraeni, W., Agustian, A., Gunawan, E., & Syahyuti. (2021). The Impact of the Use of Village Funds on: Sustainable Agricultural Development. *E3S Web of Conferences IConARD*, 232, 01018.
- Iskandar Z.S., & Aritenang, A.F. (2017). An evaluation of village funds spending to promote sustainable communities: The case Cihideung Village, West Java. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 447.
- Josselin, J-M., & Maux, L. B. (2017). *Statistical Tools for Program Evaluation: Methods and Applications to Economic Policy, Public Health, and Education*. Springer International Publishing AG.
- Khandker, R. S., Koolwal, B.G., & Samad, A.H. (2010). *Handbook on Impact Evaluation Quantitative Methods and Practices*. The World Bank. Washington DC.
- Khandker, S.R., Zaid, B., & Koolwal, B.G., (2009). The Poverty Impact of Rural Roads: Evidence from Bangladesh. *Economic Development and Cultural Change* 57 (4): 685–722.
- Maryati, S., Firman, T., Humaira, S.N.A., & Febriani, T.Y. (2020). Benefit Distribution of Community-Based Infrastructure: Agricultural Roads in Indonesia. *Sustainability*, 12, 2085.
- Marhaeni, N, I.A.A., & Sudibia, K.I. (2020). The Role of Village Funds on Village Infrastructure Conditions and the Welfare of Low income Communities in Klungkung Regency, Bali Province, Indonesia. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*. Vol 4 (1), pp-336-345.
- Muslihah, S., Siregar, O.H., & Sriniyati. (2019). Dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di kabupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 7 (1), 85-9.
- Nasution, A. F., Erlina., & Rujiman. (2017). The Role of Village Funds for Area Development in Bilah Barat Village, Labuhanbatu Regency, North Sumatra, Indonesia. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*. Vol 6 (1).
- Pavel, A., Moldovan, B., Neamtu, B., & Hinte, C. (2018). Are Investments in Basic Infrastructure the Magic Wand to Boost the Local Economy of Rural Communities from Romania?. *Sustainability*. 10, 3384.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Desa*. Jakarta. 15 Januari 2014.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta. 21 Juli 2014.
-
-

-
-
- Sumodingrat, G., & Wulandari, A. (2014). *Membangun Indonesia Dari Desa*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Thacker, S., Adshead, D., Fay, M., Hallegatte, S., Harvey, M., Meller, H., O'Regan, N., Rozenberg, J., Watkins, G., & Hall, W. J. (2019). Infrastructure for sustainable development. *Nature Sustainability*. Vol 2 (324–331).
- Wibowo, A., Mulya, I.T., & Mujiwardhani, A. (2019). Dampak alokasi dana desa bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*. Vol 1 (2), 164-177.
- Warda, N., Elmira, E., Rizky, M., Nurbani, I.R., dan Izzati, A. R. (2019). Bagaimana Mencegah Peningkatan Ketimpangan dalam Desa?. *Laporan Penelitian SMERU*. The SMERU Research Institute.